

## RINGKASAN DAN SUMMARY

Pesisir dan laut Indonesia merupakan wilayah dengan potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Aktivitas manusia yang melampaui batas dalam pemanfaatan sumberdaya, ditambah adanya pemanasan global dan faktor tata kelola pemerintahan yang salah, ekosistem pesisir dan laut tersebut banyak mengalami kerusakan, khususnya terumbu karang. Hanya 6 persen dari terumbu karang Indonesia yang berada dalam kondisi sangat baik. Fakta ini membuka pemerintah untuk mengembangkan kawasan konservasi laut (*marine protected area*-MPA).

Pengembangan MPA selama ini berjalan sentralistik dan cenderung menafikan peran masyarakat setempat dalam pengelolaan. Akibatnya nelayan tradisional merasa terpinggirkan sebagai akibat tertutupnya akses dalam pemanfaatan dan control terhadap sumberdaya perikanan karena telah berubahnya wilayah penangkapan sebagai kawasan konservasi. Konflik antara pemerintah (pihak taman nasional) dan masyarakat seringkali terjadi dalam kawasan taman nasional. Eksklusifitas kawasan konservasi yang bercorak teknokratis ini bukan hanya meminggirkan nelayan tradisional tetapi juga menegasikan peran masyarakat setempat dalam pengelolaan. Padahal masyarakat sebetulnya mempunyai konstruksi sendiri terhadap konservasi yang bisa saja berjalan beriringan dengan kawasan konservasi yang digarap oleh pemerintah baik taman nasional maupun kawasan konservasi laut daerah (KKLD). Maka tujuan dari penelitian ini adalah menemukan potensi dan permasalahan pada masing-masing model konservasi yang teknokratis maupun konstruktivistik. Selanjutnya mencari model alternatif yang merupakan bentuk perpaduan atau penggabungan atau kolaborasi antar unsur-unsur positif dalam kedua model tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, strategi studi kasus ditempatkan pada pengambilan lokasi penelitian yang meliputi Taman nasional laut Karimun Jawa Jepara Jawa Tengah dan kawasan konservasi laut daerah Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Studi kasus adalah strategi penelitian yang banyak digunakan untuk memotret masalah secara mendalam. Penggunaan studi kasus juga didasarkan atas kondisi pada masing-masing model yang sangat spesifik. Pemetaan potensi dan permasalahan yang berkembang di masyarakat serta persepsi masyarakat atas harapan baru akan dikembangkan dengan pendekatan partisipatif dengan tehnik *Focus Group Discussion* (FGD). Sedangkan data primer untuk sosial ekonomi dilakukan dengan

teknik *cluster-random sampling* pada tingkat unit analisis tingkat komunitas dan desa. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen-dokumen dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara berulang dan terus menerus yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan terhadap data yang dihasilkan dari pengamatan langsung secara berpartisipasi dan wawancara mendalam saat penelitian.

Persoalan mendasar dari zonasi adalah penentuan kawasan konservasi yang terdiri dari zona-zona. Penentuan kawasan ini berdasarkan pada seberapa besar nilai penting dari variabel-variabel yang memberikan pengaruh terhadap kebutuhan konservasi, kebutuhan masyarakat, kondisi dan isu lokal yang berkembang di lokasi-lokasi tertentu. Variabel-variabel tersebut adalah variabel sosial ekonomi dan ekologi. Variabel sosial ekonomi seperti pola pemanfaatan, usulan masyarakat, jarak lokasi dari pelabuhan, jarak lokasi dari pemukiman dan kepemilikan lahan. Sedangkan variabel ekologi meliputi kondisi terumbu karang, kondisi invertebrata, ikan karang, penyu, padang lamun, mangrove dan daerah pemijahan kerapu. Nilai penting dari masing-masing variabel ditentukan dalam skala 1-5 dengan kriteria kurang penting sampai paling penting. Nilai penting dari setiap variabel

Berdasarkan hasil survey lapang yang dilaksanakan pada bulan November 2009 terlihat bahwa rata-rata masyarakat mendukung keberadaan zonasi dengan sikap kritis. Masyarakat setuju dan mendukung terhadap keberadaan zonasi meskipun terdapat beberapa ketentuan yang dianggap kurang sesuai dengan kesepakatan awal. Reaksi masyarakat ini sejalan dengan penelitian WCS tahun 2009 yang menyatakan bahwa 78,52% masyarakat di semua Desa mendukung, 1,34% tidak mendukung dan 20,13% tidak tahu. Dukungan tertinggi diberikan oleh masyarakat Parang sebanyak 97,44% diikuti Desa Kemujan 75% dan Desa Karimunjawa 69,70%. Sedangkan yang tidak mendukung justru hanya datang dari masyarakat Karimunjawa yaitu 3,03%, sedangkan dari Desa Kemujan dan Desa Parang yang tidak mendukung sebesar 0%. Masyarakat yang tidak mengetahui masih cukup besar yaitu dari Desa Karimunjawa 27,27%, Desa Kemujan 25% dan Desa Parang 2,56%. Hasil penelitian WCS ini menjadi salah satu bahan dalam pelaksanaan survey lapang.

Kolaboratif versi masyarakat adalah duduk bersama dan penempatan tugas sesuai porsinya masing-masing. Kawasan konservasi yang diinginkan adalah yang dibentuk bersama-sama masyarakat melalui terlebih dahulu menginventarisasi kemauan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat berharap pembatasan yang dilakukan melalui zonasi dapat diikuti dengan solusi alternatif lain yang dapat menjadi mata pencaharian. Seperti berkembangnya usaha budidaya rumput laut yang berkembang pesat di Desa Kemojan dan Karimunjawa hendaknya dapat direspon oleh pihak BTNKJ. Masyarakat menganggap, pembatasan melalui zonasi yang diikuti dengan pencarian usaha alternatif seperti budidaya rumput laut adalah usaha bertahan hidup. Namun, masih kerap kali terjadi pelarangan terhadap kegiatan rumput laut karena BTNKJ menganggap nelayan rumput laut merusak terumbu karang yaitu dengan menaruh jangkar rumput laut di lokasi terumbu karang. Masyarakat berharap pihak BTNKJ dapat terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan budidaya rumput laut.